

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan bangsa yang maju. Hal ini berkaitan dengan pendidikan yang menjadi salah satu faktor utama dari peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Pendidikan selain dapat menjadi sarana untuk “*agent of change*” bagi generasi muda, juga dapat menjadi sarana untuk menciptakan transformasi yang nyata. Berdasarkan laporan UNESCO, kualitas pendidikan Indonesia di internasional berada pada peringkat ke-64 dari 120 negara (Safitri, 2022). Kualitas pendidikan di Indonesia sendiri masih jauh dibawah apabila dibandingkan dengan negara-negara di *Association of Southeast Asia Nation* (ASEAN) lainnya seperti Singapura yang berada di peringkat ke-11.

Indonesia termasuk dalam negara kepulauan yang menghadapi banyak rintangan agar memenuhi pendidikan yang merata terutama di masa pandemi Covid-19. Untuk memenuhi pendidikan di masa pandemi, teknologi menjadi sarana utama untuk melakukan pengajaran. Sayangnya, masih banyak pelajar yang memiliki keterbatasan dalam penguasaan teknologi informasi sehingga sangat berpengaruh dalam aktivitas belajar mengajar. Hal ini menjadi sebuah refleksi khususnya bagi pemerintah Indonesia bahwa banyak hal yang harus ditingkatkan untuk mencapai pemerataan pendidikan yang berkualitas. Selain teknologi, Indonesia juga harus meningkatkan kualitas pembelajaran, fasilitas yang memadai, serta penyesuaian kurikulum pembelajaran sesuai dengan zaman.

Oleh karena itu, sebagai salah satu anggota negara PBB, Indonesia turut mengadopsi agenda SDGs 2030 atau *Sustainable Development Goals* ke dalam perencanaan pembangunan negara dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat di berbagai aspek sehingga menciptakan kualitas sumber daya manusia yang dapat membantu dalam tercapainya indikator-indikator target perencanaan pembangunan nasional dan sub-nasional dari Agenda SDGs 2030 tersebut. Pendidikan menjadi

indikator 4 dari agenda SDGs 2030 yaitu *Quality Education* yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua orang memiliki akses ke pendidikan berkualitas dan kesempatan belajar seumur hidup. Dalam agenda ini pendidikan menjadi salah satu fokus utama pemerintah Indonesia karena dengan meningkatkan kualitas pendidikan juga kesehatan maka dapat menghentikan kemiskinan dan deprivasi lainnya.

Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi salah satu wilayah dengan tingkat pendidikan terendah di Indonesia. Sebagaimana dimuat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2015 yang menetapkan NTT sebagai salah satu daerah tertinggal untuk periode 2015-2019, dimana daerah-daerah tersebut akan menjadi fokus pembangunan nasional (Indonesia, 2015). Dari data BPS, provinsi NTT pada tahun 2016 tercatat hanya tiga dari empat penduduk usia sekolah (usia 7 tahun - 24 tahun) di NTT yang pernah sementara bersekolah. Dari data tersebut juga menunjukkan jika seperempat dari total penduduk usia sekolah di NTT masih ada yang berhenti sekolah maupun belum pernah sekolah. Kualitas pelajar yang rendah di NTT dengan jumlah penduduk yang tinggi membuat rata-rata usia di atas 15 tahun yang tidak mempunyai ijazah karena tidak pernah mengenyam pendidikan yang berkualitas sebelumnya (B. NTT, 2015).

Kualitas pendidikan di provinsi dapat diukur dengan banyak indikator, salah satunya adalah angka melek huruf (AMH) dan rata-rata lama pendidikan. Pada periode 2013-2017, NTT sendiri mencatat peningkatan indikator AMH, dimana angka melek huruf 15 tahun ke atas pada tahun 2017 sebesar 91,68 persen dan 8,32 persen penduduk buta huruf. Rata-rata AMH di kabupaten NTT adalah 91 persen antara tahun 2013 dan 2017. Pada saat yang sama, rata-rata lama sekolah di NTT juga harus diperhatikan. Jumlah standar tahun seseorang harus memperoleh pendidikan, yaitu Lulus/ sederajat SD adalah 6 tahun untuk tamat/ sederajat SMP adalah 9 tahun dan seterusnya. Pada tahun 2017, rata-rata lama pendidikan penduduk berusia 15 tahun ke atas adalah 7,62 tahun, atau rata-rata penduduk NTT hanya menyelesaikan pendidikannya pada kelas 7 atau tahun pertama SMP/ sederajat (Kennedy, Tobing, & et al., 2019).

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah angka partisipasi penduduk dari kelompok umur tertentu. Semakin tinggi skor APS, semakin banyak penduduk usia sekolah yang bersekolah. Hampir seluruh anak usia sekolah berumur 7-12 tahun (98,27 persen) dan 13-15 tahun (94,76 persen) bersekolah atau lembaga pendidikan baik formal maupun informal. Sementara itu, ketersediaan kesempatan pendidikan pada kelompok umur 16 sampai 18 tahun relatif rendah (74,65 persen). Rata-rata hanya 3 dan 4 warga usia 16-18 tahun yang sementara bersekolah, selebihnya tidak mau sekolah (Kennedy, Tobing, & et al., 2019)

**Tabel 1. 1 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur**

Kelompok Umur	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur (%)				
	2013	2014	2015	2016	2017
<i>7 - 12</i>					
-Laki-laki - Perempuan	96,60 98,10	97,35 98,66	97,60 98,67	98,24 98,35	93,71 98,65
<b>Total</b>	<b>97,34</b>	<b>97,99</b>	<b>98,13</b>	<b>98,12</b>	<b>98,27</b>
<i>13 - 15</i>					
-Laki-laki - Perempuan	89,23 89,64	93,81 94,77	92,14 96,70	94,60 91,80	93,71 95,88
<b>Total</b>	<b>89,43</b>	<b>94,26</b>	<b>94,39</b>	<b>97,50</b>	<b>94,76</b>
<i>16 - 18</i>					
-Laki-laki - Perempuan	64,64 64,99	73,70 74,24	71,25 77,39	74,56 73,25	71,97 77,48
<b>Total</b>	<b>64,81</b>	<b>73,96</b>	<b>74,25</b>	<b>75,94</b>	<b>74,65</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, 2019

Berdasarkan indikator pembangunan pendidikan, permasalahan pembentukan NTT adalah rendahnya daya serap penduduk di tingkat SMP dan SMA. Masalah pendidikan lainnya antara lain rendahnya angka melek huruf, kualifikasi pendidikan yang tinggi, angka putus sekolah yang tinggi, kualifikasi guru dan tenaga kependidikan yang rendah, serta ketersediaan layanan dan infrastruktur pendidikan yang kurang memadai.

Sebagai upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai target pendidikan yang berkualitas di provinsi NTT, yang juga dalam konteks hubungan internasional saat ini didominasi oleh pola-pola yang telah bertransformasi ke arah cooperative, maka

pemerintah Indonesia melakukan kerja sama dengan UNICEF sebagai organisasi internasional yang membantu memantau dan mengukur kemajuan terhadap hak-hak yang berfokus pada anak.

Pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dengan UNICEF dapat dilihat sebagai upaya Indonesia untuk terus mendukung dan mengembangkan sektor pendidikan di Indonesia agar mampu bersaing di tingkat internasional. Posisi Indonesia sebagai negara ke empat penduduk terbanyak mengakibatkan belum meratanya pembangunan di sektor pendidikan. Masih belum efektifnya peran pemerintah dalam mengatasi masalah pendidikan di daerah-daerah terpencil dan tertinggal salah satunya di provinsi NTT. Pemerintah Indonesia dalam hal ketidakefektifan tidak hanya dalam mengelola pendidikan di wilayah saja namun juga dalam keterbatasan dana dan sumber daya manusianya. Oleh karena itu Indonesia membutuhkan pihak lain dalam hal ini organisasi internasional seperti UNICEF untuk mengatasi pendidikan anak di provinsi NTT. Untuk UNICEF sendiri dalam melakukan kerja sama karena didasari dengan misinya dalam membantu hak-hak anak sehingga ketika terdapat masalah dengan isu tersebut di suatu negara, maka UNICEF dapat berpartisipasi didalamnya. Jika dilihat melalui politik luar negeri maka kerja sama sebuah negara berasal dari desakan-desakan masalah atau kebutuhan-kebutuhan dalam negeri yang tidak dapat diatasi oleh pemerintah.

Setiap tahunnya, UNICEF Indonesia selalu mempublikasikan Annual Report dan dokumen-dokumen hasil pelacakan kemajuan hasil kerja sama yang nantinya bisa digunakan sebagai alat informasi untuk kebutuhan perencanaan dan pemrograman di kemudian hari. Perluasan bidang kerja sama UNICEF-RI menghasilkan rencana aksi berupa program aksi yang lebih komprehensif, yang disebut dengan *Country Programme Action Plan*. *Country Programme Action Plan* (CPAP) adalah program perjanjian kerja sama 5 tahun antar Indonesia dengan UNICEF yang berisi *outcome*, *output*, dan *indicator* yang akan dicapai. Program ini memiliki 8 provinsi pelaksana program atau target wilayah dari CPAP yang mana disesuaikan dengan kantor

lapangan UNICEF, yaitu provinsi Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Papua dan Papua Barat (Alika, 2021).

Melalui CPAP, NTT menjadi salah satu provinsi sasaran dari pelaksanaan program ini yang dilakukan sebagai kontribusi dalam percepatan target RPJMN, RPJMD, maupun target dari agenda SDGs 2030. Selain itu, terlaksananya CPAP juga merupakan tujuan pemerintah untuk menghilangkan ketimpangan dan ketertinggalan masyarakatnya dalam segala aspek pembangunan. CPAP UNICEF – Indonesia tahun 2016-2020 terlaksana dengan komponen area program kerja sama, yaitu: *Child Survival and Development, Education for Early Childhood and Adolescent Development, Child Protection, Social Policy and Emergency Preparedness & DRR Programme, Communication and Public Advocacy, dan Program Effectiveness* (Ariyanti, 2015).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, tulisan ini akan membahas bagaimana implementasi kerja sama Indonesia dan UNICEF dalam pengembangan kualitas pendidikan di NTT melalui *Program Country Programme Action Plan (CPAP) 2016 – 2020*. Kualitas pendidikan menjadi urgensi sebagai pilar pembangunan dan kesejahteraan hidup di Indonesia khususnya agar tercapainya agenda SDGs 2030, maka signifikansi penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut tentang jalannya program yang telah disepakati oleh UNICEF – Indonesia di tahun 2016-2020. Pemilihan provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai objek dalam penelitian ini karena peneliti tertarik dengan masih banyaknya wilayah di NTT yang tertinggal tetapi disatu sisi juga NTT menjadi fokus pemerintah Indonesia dalam pembangunan di periode tersebut. Selain itu juga peneliti menilai jika program-program yang telah dijalankan oleh UNICEF sangat berperan aktif terhadap meningkatnya indikator kualitas pendidikan di Indonesia.

Dalam menunjang penelitian yang berkaitan dengan permasalahan pendidikan, terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait isu yang diteliti. Tinjauan pustaka terdiri dari 3 pembabakan, yang pertama mengenai peran UNICEF di Indonesia,

kedua peran UNICEF dalam bidang pendidikan di Indonesia, ketiga peran NGO yang juga berperan aktif dalam pengembangan pendidikan di Indonesia.

Pada pembabakan pertama tentang peran UNICEF di Indonesia. Terdapat literatur karya Oktadewi (2018) yang menjelaskan bahwa angka *Child Trafficking* di Indonesia hingga saat ini masih tinggi dan belum dapat terselesaikan secara tepat. Padahal setiap anak memiliki hak kelangsungan hidup, tumbuh kembang, partisipasi, maupun perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi yang harus diperhatikan oleh suatu negara. Sejalan dengan pendapat Oktadewi (2018), literatur karya Herviryandha & Nashir (2022) juga menjelaskan bahwasannya permasalahan *Child Marriage* di Indonesia pun angkanya masih tinggi. Faktor yang mempengaruhi Indonesia masih tinggi akan permasalahan tersebut karena lingkungannya sendiri yang masih dipengaruhi oleh faktor kemiskinan, kurangnya informasi dan pendidikan, serta kurangnya kepedulian orang tua.

Dari literatur karya Oktadewi (2018) dan Herviryandha (2022), pada dasarnya peran UNICEF masih belum dapat dikatakan bernilai sangat efektif. Karena dalam pelaksanaan programnya wilayah yang dituju belum merata dan untuk menghasilkan keefektifan yang signifikan untuk Indonesia perlu proses panjang. Akan tetapi, UNICEF sebagai organisasi internasional berupaya membantu Indonesia dalam menanggulangi permasalahan tersebut. UNICEF memainkan peran penting berupaya untuk mengurangi angka dari permasalahan tersebut serta dapat membantu anak-anak Indonesia untuk mendapatkan haknya sebagai mana mestinya tanpa ada diskriminasi. Maka, dari kedua literatur tersebut sama-sama menjelaskan upaya UNICEF dalam membantu Indonesia melalui program-program aksi yang dibuat oleh UNICEF.

Adapun perbedaan di antara kajian kedua penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah isu yang berbeda. Isu yang di ambil peneliti yaitu pendidikan, sehingga dengan perbedaan isu tersebut itu akan membedakan juga terhadap pendekatan program-program UNICEF yang diimplementasikan. Selain itu, dari kajian kedua penelitian tersebut lebih menitikberatkan terhadap efektivitas peran UNICEF

terhadap suatu permasalahan. Sedangkan, penelitian yang dilakukan peneliti akan lebih melihat implementasi kerja sama yang dilakukan. Bukan hanya peran UNICEF saja, akan tetapi aksi dari tiap aktor salah satunya Indonesia yang merupakan aktor negara.

Terkait dengan isu yang diambil peneliti yaitu pendidikan maka pembabakan kedua yaitu peran UNICEF dalam bidang pendidikan di Indonesia. Literatur karya Lamiraj (2020) menjelaskan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan investasi untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini terbukti dengan usia 0-6 tahun merupakan usia emas anak untuk dapat memaksimalkan dalam proses pembelajaran. UNICEF pun mengembangkan model professional untuk anak usia dini yaitu PAUD HI dimana model tersebut menunjukkan peran yang baik serta efektif dalam membantu pendidikan anak usia dini di Kupang. Terbukti dengan keputusan pemerintah kabupaten Kupang untuk melanjutkan program PAUD HI ke dalam RPJMD Kupang.

Bersamaan dengan pendapat dari Lamiraj, Anisa (2014) juga berpendapat dalam penelitiannya jika Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah langkah awal sebagai asset pendidikan dalam perkembangan anak untuk menjadi sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan. Anisa (2014) menjelaskan jika dalam mengembangkan pendidikan dan kesehatan melalui program PAUD HI di Sulawesi Selatan perlu juga bantuan dana hibah dari pola kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah dengan UNICEF. Bantuan yang diberikan oleh UNICEF dalam PAUD HI di Sulawesi Selatan memiliki dampak yang sangat baik karena PAUD HI jadi lebih terintegrasi. Penelitian ini juga menjelaskan pendanaan yang UNICEF dapatkan dan prosesnya untuk dihibahkan sebagai bantuan untuk PAUD HI di Sulawesi Selatan.

Bantuan dana hibah yang diberikan oleh mitra harus sejalan dengan tata kelola yang tepat di negara tujuan yang akan diberikan bantuan tersebut. Seperti penjelasan dari Soleha (2020) yang menjelaskan jika dalam pelaksanaan kerja sama dengan pemberian bantuan internasional oleh UNICEF untuk pelaksanaan PAUD berkualitas di Kabupaten Bogor, harus memperhatikan tata Kelola dengan menggunakan konsep

mitigasi *unintended effects*. Tidak hanya focus terhadap jalannya dan hasil suatu kerja sama saja, namun juga factor-faktor lain, seperti terjadinya unintended effects karena faktor manusia sehingga memunculkan hasil kebijakan tidak diinginkan dalam pelaksanaan kerja sama harus diperhatikan.

Perbedaan dari kajian ketiga penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah wilayah tempat dilaksanakannya kerja sama UNICEF dengan Indonesia. Yang mana pada penelitian milik Lamiraj (2020) focus wilayah penelitiannya terletak di Kupang dengan pembahasannya yang hanya memfokuskan terhadap pendidikan anak usia dini saja. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Anisa (2014) dan Soleha (2020) dimana penelitian tersebut hanya focus terhadap pendidikan anak usia dini saja. Serta ketiga penelitian tersebut lebih menjelaskan peranan UNICEF, berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yang akan melihat bagaimana implementasi kerja sama nya antara UNICEF dengan negara mitra. Selain itu penelitian yang dilakukan peneliti tidak hanya jenjang PAUD saja namun peneliti akan melihat indikator lain dari jenjang lainnya. Serta, lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Indonesia dalam memenuhi kepentingan nasionalnya tidak hanya bermitra kepada satu negara ataupun satu organisasi saja. Namun, Indonesia turut aktif untuk bermitra kepada aktor lainnya. Salah satunya Non-Governmental Organization (NGO) atau organisasi yang keanggotaannya tidak mewakili pemerintah dimana sudah banyak aktif berperan dalam pembenahan pendidikan di Indonesia. Maka, peneliti melakukan pembabakan ketiga yaitu peran NGO dalam pengembangan pendidikan di Indonesia.

Pada literatur karya Anindya (2021) menjelaskan jika dalam upaya mewujudkan agenda pembangunan Indonesia khususnya dalam bidang pendidikan, Indonesia melakukan kerja sama dengan salah satu NGO yaitu *Childfund International*. Peran aktif yang diberikan Childfund International dalam mewujudkan pendidikan yang baik di NTT lebih banyak ke arah bantuan-bantuan seperti pembangunan sekolah, pelatihan metode PAIKEM, kegiatan interaktif

berbasis desa untuk para siswa dan orang tua murid, serta pelaksanaan event-event seperti Gebyar Cerdas Anak dan Orangtua. Walaupun tidak memiliki program-program yang berkelanjutan seperti program-program UNICEF, namun bantuan yang diberikan Childfund International juga membantu dalam peningkatan kualitas pendidikan di NTT secara signifikan.

Penelitian yang dilakukan Anindya (2021) menitikberatkan pada dampak NGO terhadap partisipasi anak penerima bantuan di sekolah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistyaningsih (2020) yang menitikberatkan penelitian pada dampak bantuan dari NGO International terhadap kualitas teknik parenting bagi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Wahana Visi Indonesia (WVI) sebagai NGO dalam penelitian ini lebih memberikan edukasi terhadap orang tua dalam proses pendidikan anak sejak usia dini. Di mana terdapat sasaran lingkungan rumah yang akan mendapatkan penyuluhan dari NGO tersebut. Pada dasarnya sebagian besar orang tua sudah menyadari seperti apa kondisi belajar anaknya terbukti dari program penyuluhan yang diberikan oleh WVI. Namun, memang bantuan yang diberikan oleh WVI ini masih terbatas dan belum sepenuhnya dapat memberikan program aksi yang lebih komprehensif.

Dari kajian kedua penelitian tersebut terdapat perbedaan dari aktor negaranya. Yang mana subjek dari penelitian peneliti akan mengambil UNICEF. Namun, gagasan yang dijelaskan oleh Anindya (2021) dan Endah (2020) akan membantu peneliti dalam mengambil beberapa indikator dari masing-masing peneliti.

Berdasarkan pembabakan yang telah dilakukan oleh peneliti dari tinjauan pustaka di atas, hingga kini belum ada penelitian yang secara spesifik membahas mengenai kerja sama yang dilakukan Indonesia dan UNICEF dalam bidang pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Maka dari itu terdapat garis perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini. Meskipun terdapat berbagai penjelasan tentang peran UNICEF di wilayah-wilayah Indonesia pada bidang pendidikan, namun itu belum tentu relevan dengan situasi wilayah penelitian yang akan diambil peneliti di Provinsi NTT. Maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait

bagaimana implementasi kerja sama yang dilakukan antara Indonesia dan UNICEF untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Nusa Tenggara Timur melalui Country Programme Action Plan Tahun 2016-2020.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Kualitas pendidikan di Indonesia yang masih rendah khususnya di wilayah terpencil seperti provinsi NTT membuat daerah tersebut tertinggal di berbagai bidang salah satunya di bidang pendidikan. UNICEF menjadi salah satu organisasi internasional yang telah lama bekerja sama dengan Indonesia, membuat UNICEF terus berperan aktif untuk turut berkontribusi dalam rangka perbaikan kualitas anak khususnya bidang pendidikan di provinsi NTT. Berdasarkan uraian di atas mengenai kerja sama UNICEF dengan pemerintah Indonesia melalui program CPAP terutama dalam perkembangan pendidikan anak maka dapat disimpulkan rumusan masalahnya, *“Bagaimana implementasi kerja sama antara UNICEF dan Indonesia dalam pengembangan kualitas pendidikan melalui CPAP tahun 2016-2020 di Provinsi NTT?”*

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengeksplorasi, dan memberikan gambaran terkait penerapan strategi kerja sama dari Indonesia maupun UNICEF sebagai mitranya dalam rangka pengembangan kualitas pendidikan melalui implementasi dari *Country Programme Action Plan (CPAP)* di Nusa Tenggara Timur tahun 2016-2020.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Peneliti berharap manfaat penelitian ini dalam konteks akademis dan non akademis, seperti:

1. Diharapkan dapat memberikan gambaran hasil strategi dari peranan UNICEF maupun pemerintah Indonesia dalam perkembangan kualitas pendidikan di Nusa Tenggara Timur (NTT)

2. Dapat memberikan wawasan bagi masyarakat mengenai kerja sama internasional antara Indonesia dan UNICEF dalam perwujudan pembangunan di bidang pendidikan, juga dapat membantu masyarakat yang memiliki minat dalam mengkaji UNICEF sebagai aktor non negara
3. Diharapkan dapat menjadi referensi dalam mengkaji CPAP UNICEF dengan Indonesia. Penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran dan informasi yang cukup deskriptif terkait strategi serta peranan UNICEF dalam perkembangan pendidikan yang berkualitas di-NTT, sehingga kedepannya dapat dijadikan bahan informasi untuk kepentingan terkait.

### **1.5 Sistematika Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang akan diulas pada penelitian ini, peneliti mengelompokkan penelitian ini dengan beberapa bagian dengan sub-bab didalamnya, sistematika penelitiannya sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab pertama ini akan membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan juga sistematika penelitian penelitian ini.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab kedua akan membahas landasan teori dan konsep yang menjelaskan perspektif teori dan konsep yang digunakan guna mendukung proses kerangka pemikiran penelitian ini. Di bab kedua ini juga memuat alur pemikiran serta asumsi dasar penelitian.

#### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ketiga ini akan membahas metode penelitian yang digunakan peneliti guna memaksimalkan hasil akhir penelitian. Selain itu, pada bab ketiga peneliti juga menjelaskan tentang objek penelitian, jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta lokasi, dan waktu penelitian.

## **BAB IV : DINAMIKA KERJA SAMA INDONESIA – UNICEF DAN DINAMIKA PENDIDIKAN DI INDONESIA**

Bab ke-empat peneliti akan membahas mengenai gambaran sejarah kerja sama antara Indonesia dengan UNICEF, termasuk pencapaian yang berhasil dicapai Indonesia maupun UNICEF. Serta dinamika sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia, termasuk juga dengan kebijakan yang diadopsi maupun program-program yang sukses dalam membantu kualitas pendidikan di Indonesia.

## **BAB V : IMPLEMENTASI KERJA SAMA INDONESIA-UNICEF DALAM PENGEMBANGAN KUALITAS PENDIDIKAN MELALUI *COUNTRY PROGRAMME ACTION PLAN* TAHUN 2016 - 2020 DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Bab kelima peneliti akan menjabarkan jawaban dari rumusan masalah yang telah peneliti ajukan. Pada bab ini akan dijelaskan secara terperinci mengenai bagaimana implementasi kerja sama pemerintah Indonesia dengan UNICEF dalam mengembangkan kualitas pendidikan melalui CPAP tahun 2016-2020 di NTT. Peneliti juga menjelaskan bagaimana strategi-strategi dari masing-masing aktor agar tercapainya kerjasama tersebut.

## **BAB VI : PENUTUP**

Bab ke-enam ini berfungsi merangkum hasil penelitian berupa kesimpulan yang padat dan jelas. Hasil analisa peneliti juga akan menghasilkan saran-saran.